



**EFEK KINERJA KEUANGAN MEMEDIASI PENGARUH BANTUAN
MODAL KERJA (DUMISAKE), PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN
TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA JAMBI**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Manajemen Pada Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi**

Oleh :

MARDIANSYAH

NIM. P2C223013

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JAMBI

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh bantuan modal kerja (program Dumisake), pendampingan, dan pelatihan terhadap kinerja UMKM serta kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran mediasi kinerja keuangan dalam hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 93 UMKM penerima bantuan modal kerja Program Dumisake pada tahun 2023 dan 2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Sebaliknya, pendampingan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Bantuan modal kerja, pula pendampingan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Uji mediasi menunjukkan bahwa pengaruh bantuan modal kerja terhadap kinerja UMKM melalui kinerja keuangan tidak signifikan, sementara pendampingan dan pelatihan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM melalui kinerja keuangan.

Kata Kunci: *Modal, Dumisake, Pendampingan, Pelatihan, Keuangan, Kinerja UMKM.*

ABSTRACT

This study aims to investigate and explain the effects of working capital assistance (Dumisake program), mentoring, and training on the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well as their financial performance in Jambi City. In addition, the study analyzes the mediating role of financial performance in the relationship between these three variables and MSME performance. This research employs a quantitative approach using a survey method involving 93 MSMEs that received working capital assistance from the Dumisake Program in 2023 and 2024. The data analysis technique used is Partial Least Squares (PLS). The research results show that working capital assistance does not have a positive and significant effect on MSME performance. In contrast, mentoring and training have a positive and significant impact on MSME performance. Working capital assistance, as well as mentoring and training, have a positive and significant effect on financial performance. Financial performance is proven to have a positive and significant influence on MSME performance. Mediation tests indicate that the effect of working capital assistance on MSME performance through financial performance is not significant, whereas mentoring and training have a positive and significant effect on MSME performance through financial performance.

Keywords: *Capital, Dumisake, Mentoring, Training, Finance, MSME Performance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa Pandemi Covid-19. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan UMKM dalam perekonomian diantaranya yaitu membantu penyerapan tenaga kerja, membantu meratakan perekonomian Indonesia, mendorong ekspor negara, dan membantu ketahanan ekonomi nasional (Pratiwi and Hanafi 2016).

Sebagian UMKM yang ada di Indonesia merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. (Boro, Kellen, and W.Ballo 2024). Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di

Indonesia.

Isu utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Meskipun UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, menyerap hampir 97% angkatan kerja dan menyumbang 61,07% terhadap PDB, banyak pelaku UMKM, terutama yang berbasis rumah tangga, kesulitan mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan mereka dan menghambat upaya dalam mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dukungan akses modal, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan, agar UMKM dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Di samping potensinya yang besar, namun UMKM masih seringkali mengalami kendala dalam meningkatkan pendapatan. Menurut Sukirno dalam (Tinneke et al. 2020) pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM yaitu kurangnya permodalan. Kurangnya permodalan UMKM disebabkan karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Handini 2020) . Ketersediaan permodalan baik dari pemerintah dan bantuan lewat sebuah program

sangatlah dibutuhkan. Bantuan modal UMKM adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu (pemodal) kepada pelaku usaha. Diberikan untuk dapat membantu para pelaku usaha agar dapat mengembangkan bisnis yang ingin dibangun atau yang sudah dijalankan dalam bentuk bantuan modal usaha perorangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) bantuan modal dapat meningkatkan pendapatan UMKM sentra batik di desa Bengle, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Artinya semakin banyak bantuan modal yang masuk, maka pendapatan UMKM sentra batik ini juga akan semakin besar (Handini et al., 2020).

Kendala lainnya yang juga sering dialami oleh UMKM adalah Sumber Daya Manusia (SDM) (Chandra et al. 2024) yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya (Handini et al.,2020). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan SDM sehingga UMKM juga dapat semakin berkembang. Contoh pendampingan yang diberikan kepada para pelaku UMKM yaitu pelatihan, maupun pendampingan dalam mengakses perizinan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanissa dan Utami (2018) terdapat pengaruh positif

pendampingan terhadap peningkatan pendapatan. Artinya semakin sering pendampingan yang diberikan maka semakin banyak pula peningkatan pendapatan.

Mengingat potensi dan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian, maka bantuan dari pemerintah sangat diperlukan. Tujuan akhirnya adalah agar UMKM mampu bersaing secara efektif di pasar domestik dan internasional. Selain pelatihan, dukungan yang diberikan juga berupa modal yang disalurkan kepada pelaku usaha. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM. Mengingat kondisi saat ini, perlu dicatat bahwa perekonomian Indonesia telah terkena dampak buruk dari pandemi Corona, yang mengakibatkan perlambatan. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami penurunan.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, atau disingkat PEN sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali perekonomian, pemerintah meluncurkan program PEN untuk memerangi pandemi Covid-19 dan bahaya lain yang lebih serius terhadap sistem keuangan dan perekonomian negara (Abubakar & Handayani, 2021). Lima (5) kegiatan yang termasuk dalam program PEN adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan strategi pengelolaan perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya merupakan salah satu cara untuk menjauhkan aset negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau mencari sumber

alternatif. modal.

2. Untuk melakukan penempatan dana, pemerintah mentransfer sejumlah uang ke bank komersial yang ditunjuk dan kemudian membebaskan tingkat bunga tertentu kepada bank tersebut.
3. Investasi Pemerintah; praktik mengalokasikan sebagian anggaran suatu negara atau sumber daya keuangan jangka panjang lainnya kepada bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, atau lainnya melalui pembelian saham, obligasi, atau sarana investasi lainnya.
4. Jaminan adalah jaminan bahwa penjamin akan melunasi utang-utang yang dijanjikan kepada pihak yang menerima jaminan.
5. Belanja negara menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memberikan stimulus guna mendukung kelangsungan sektor UMKM di era pandemi dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu mendorong stabilitas perekonomian sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan, merupakan wujud nyata pemerintah. Bantuan untuk sektor UMKM, karena kemungkinan banyak orang akan kehilangan mata pencahariannya, yang berdampak pada lingkungan sosial budaya, politik, dan keamanan (Sari et al., 2021). Wabah Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yaitu sebesar 3,5% pada tahun 2020 dan 3,66% pada tahun 2021. Kemiskinan dan pengangguran terkena dampak langsung dari terhentinya pembangunan ekonomi tersebut. Perekonomian yang lemah dan kendala output

menyebabkan industri produksi memangkas staf di banyak posisi, sehingga mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,13% di Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi pemberdayaan dan meningkatkan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Mustafa 2021). Tujuan dari stabilisasi perekonomian lokal adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di Provinsi Jambi, Koperasi dan UMKM merupakan industri penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan pengembangan ekonomi masyarakat (Nuraeni, 2018). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Jambi. UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemerataan pendapatan. Namun, UMKM seringkali menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan mereka, terutama terkait dengan keterbatasan modal kerja, kurangnya keterampilan manajerial dan operasional, serta akses terbatas terhadap informasi dan teknologi.

Di Kota Jambi, fenomena serupa juga terjadi. Banyak UMKM yang memiliki potensi besar namun terkendala oleh masalah klasik seperti kesulitan mendapatkan modal yang terjangkau, kurangnya pendampingan yang

berkelanjutan, dan minimnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kondisi ini seringkali berimplikasi pada kinerja keuangan UMKM yang kurang optimal, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah provinsi di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026: (1) mewujudkan koperasi modern dan berkualitas; dan (2) mewujudkan UMKM dan pengusaha naik kelas yang mampu bersaing di pasar lokal dan internasional (Rijal 2022).

Program Dumisake, sebagai salah satu inisiatif pemerintah Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi, hadir dengan tujuan untuk memberdayakan UMKM melalui penyediaan bantuan modal kerja. Diharapkan, suntikan modal ini dapat mengatasi masalah likuiditas dan memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Namun, efektivitas bantuan modal kerja ini dalam meningkatkan kinerja UMKM tidak dapat berdiri sendiri. Faktor-faktor lain seperti pendampingan dan pelatihan juga diyakini memiliki peran penting dalam memastikan UMKM dapat memanfaatkan modal yang diterima secara optimal dan berkelanjutan.

Program PEN dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai sarana

pemberian bantuan terhadap program pemerintah federal. Keputusan ini berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor: 25/INGUB/TAPD/2021, tanggal 19 Juli 2021, yang membahas tentang refocusing anggaran kegiatan dan subkegiatan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Program Bantuan Modal Kerja terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi didanai melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu UMKM dalam menjalankan perusahaan mereka selama krisis pandemi Covid-19. Bantuan modal untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam Program PEN Provinsi Jambi.

Pelaku usaha di Provinsi Jambi yang termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhak mengajukan permohonan modal kerja, yang prosesnya dimulai dengan mengajukan proposal kepada Gubernur Jambi melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Selain itu, evaluasi, verifikasi, dan penerbitan rekomendasi/ dukungan terhadap calon penerima bantuan modal kerja akan ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Tim mengkaji dan memverifikasi data calon penerima bantuan sebelum Kepala Dinas memutuskan siapa yang akan diserahkan kepada Gubernur Jambi sebagai penerima bantuan. Berdasarkan beberapa temuan, dapat disimpulkan bahwa penambahan modal kerja berupa bantuan modal usaha menjadi harapan besar bagi para pelaku UMKM. Program Bantuan Permodalan kepada UMKM ini sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

yang akan dimulai pada tahun 2022 berupa bantuan modal usaha kepada UMKM/Industri Rumah Tangga/startup tunai melalui Bank Jambi kepada UMKM/Tahun. Jika penyaluran bantuan dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan bantuan dari Pemprov Jambi dapat memberikan multi-flyer effect bagi banyak pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Bantuan yang diberikan tidak hanya dinikmati oleh para pelaku UMKM penerima bantuan saja, namun manfaatnya juga dapat dirasakan secara terukur oleh lebih banyak lagi pelaku UMKM mitra yang ditunjuk. Sementara bagi Pemprov Jambi, selain peningkatan literasi keuangan, tanggung jawab pelaporan juga akan menjadi lebih akuntabel. Melalui mekanisme ini juga dapat menjadi landasan pendukung Sistem Informasi Data Tunggal UMKM di Provinsi Jambi untuk melaksanakan program pemberdayaan dalam jangka panjang.

Bantuan permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani dampak social. Program ini disebut Dumisake, dan tujuannya adalah untuk membantu perekonomian provinsi pulih lebih cepat dan mengurangi kemiskinan (Simanjourang and Rahmawati 2022). Dalam rangka Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Berupa Uang dan atau Barang dan Jasa, terdapat ketentuan bantuan permodalan bagi UMKM. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatannya sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Herlin, Kusmaladewi, and Dani 2024)

Melalui program Dumisake, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana untuk mengatasi dampak sosial masyarakat. Menurut Friska (2023), program Dumisake dirancang untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi. Upaya menjaga operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat terbantu. Program Dumisake merupakan program Gubernur Jambi yaitu Jambi Tangguh yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi berupa Bantuan Modal yang mana bantuan modal usaha yang diserahkan kepada masyarakat/ individu/ pelaku usaha dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun dasar hukum Program Kegiatan Gubernur tertuang dalam RPJMD No. 11 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang dalam hal ini akan berdampak pada pemerataan pembangunan sehingga mendukung Pemerintah Pusat dalam hal Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program Bantuan modal kerja (Dumesake) disalurkan berupa Dana yang langsung ditransfer kepada rekening masyarakat/ individu/ pelaku usaha dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penerima bantuan pada tahun 2023 mencapai 3.600 UMKM, dan pada tahun 2024 mencapai 2.000 UMKM yang telah disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota di Jambi (Data Penerima Dumisake Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi tahun 2023-2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan terhadap kinerja UMKM. Beberapa temuan penting dari penelitian terdahulu antara lain:

- Pengaruh Bantuan Modal Kerja: Penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal kerja dapat meningkatkan likuiditas, investasi, dan skala usaha UMKM, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana (2024) dan Nisa & Lindananty (2024) yang menunjukkan bahwa bantuan modal mempengaruhi kinerja UMKM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana modal tersebut dikelola dan diinvestasikan.
- Pengaruh Pendampingan: Pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan manajerial, dan kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan pasar. Penelitian oleh Trimustikapuri et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan literasi keuangan secara signifikan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola pembukuan, pengeluaran, dan pengambilan keputusan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja usaha. Selanjutnya, penelitian oleh Rialdy and Melisa (2023) menemukan bahwa pendampingan kewirausahaan mampu meningkatkan pengetahuan ekonomi dan semangat berwirausaha masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara kolektif dan lebih efisien, sehingga usaha menjadi lebih berkembang. Penelitian lain oleh Devita (2023) dan Hakim (2016) juga memperkuat bahwa pendampingan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Pendampingan seringkali fokus pada aspek keuangan, pemasaran, operasional, dan legalitas usaha.

- Pengaruh Pelatihan: Pelatihan yang relevan dengan kebutuhan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk, dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan inovasi dalam usaha. Pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan UMKM—mulai dari kewirausahaan dan manajemen keuangan hingga pemasaran digital dan pengembangan produk—telah terbukti meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong inovasi usaha. Hasibuan dan Rahayu (2022) melaporkan bahwa pelatihan kewirausahaan secara signifikan memperkuat kreativitas dan inovasi produk, sedangkan Nurfadillah dan Wibowo (2021) menemukan bahwa pelatihan digital marketing mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Fauzan (2022) menambahkan bahwa pelatihan yang diselaraskan dengan tugas pokok UMKM meningkatkan kualitas pengetahuan serta strategi pemasaran, yang secara langsung mendorong peningkatan penjualan. Sukriani (2017) bahkan mencatat bahwa hampir separuh peningkatan kinerja UMKM dapat dijelaskan oleh pelatihan yang diterima pelaku usaha, sementara Alinsari (2021) menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana meningkatkan literasi keuangan dan penggunaan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Studi terkini oleh Halwiah et al. (2025) dalam konteks inkubator bisnis menegaskan efek positif pelatihan terstruktur pada kinerja keuangan UMKM, dan Purnomo (2016) menyoroti bahwa pelatihan berkelanjutan meningkatkan efisiensi pengambilan

keputusan finansial. Terakhir, Khairi et al. (2023) memaparkan bahwa pelatihan bertindak sebagai mediator penting antara literasi keuangan dan peningkatan kinerja keuangan UMKM, menegaskan peran sentral pelatihan dalam pemberdayaan usaha kecil.

- Peran Mediasi Kinerja Keuangan: Beberapa penelitian juga menyoroti peran kinerja keuangan sebagai mediator antara intervensi (seperti bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan) dengan kinerja bisnis secara keseluruhan. Utami (2020) menemukan bahwa bantuan modal yang dipadukan dengan pelatihan dan pendampingan hanya memberikan hasil optimal apabila disertai praktik pengelolaan keuangan yang baik, menegaskan bahwa peningkatan kinerja keuangan menjadi jalur utama yang memediasi dampak positif intervensi eksternal terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Peningkatan kinerja keuangan, seperti peningkatan profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan aset, dapat menjadi indikator bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi yang telah menerima bantuan modal kerja (program Dumisake) pada tahun 2023 dan 2024 yang berjumlah 1.401 UMKM. Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi memiliki 11 Kecamatan diantaranya Kecamatan Telanaipura, Pelayangan, Pasar JAMBI, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan, Danau Teluk, Kota Baru, Danau Sipin dan Alam Barajo. Berdasarkan data Online Data Sytem (ODS) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi tahun 2024, UMKM yang ada di Kota Jambi berjumlah 6.190,

dengan demikian Program Bantuan modal Dumesake belum tersalurkan sepenuhnya ke UMKM yang ada di Kota Jambi.

Tabel 1. 1 Data Penerima Bantuan (Dumisake) Kota Jambi Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Bantuan Modal Kerja (Program Dumisake)		Keterangan
		2023	2024	
1	Telanaipura	87	60	Bantuan Modal bagi UMKM 2023-2024 berupa dana yang di tranfer langsung ke rekening masing-masing Pelaku Usaha berjumlah 1.401 UMKM
2	Pelayang	23	22	
3	Pasar Jambi	19	26	
4	Paal Merah	100	98	
5	Jelutung	77	47	
6	Jambi Timur	37	45	
7	Jambi selatan	75	60	
8	Danau Teluk	15	19	
9	Kota Baru	69	63	
10	Danau Sipin	67	89	
11	Alam Barajo	122	181	
Jumlah		691	710	

Sumber: Data Diolah, 2024

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Pememerintah Kota Jambi, baik untuk pembinaan, pendampingan dan peningkatan SDM berupa Pelatihan, termasuk memberikan permodal usaha guna meningkatkan kinerja UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat. Dumesake merupakan salah satu upaya untuk membantu usaha kecil dan menengah dalam mengatasi keterbatasan kebutuhan modal.

Berdasarkan isu dan fenomena yang terjadi di Kota Jambi, serta tinjauan penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan, penelitian mengenai pengaruh bantuan modal kerja (program Dumisake), pendampingan, dan pelatihan dengan mediasi kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi menjadi

penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program Dumisake dan intervensi pendukung lainnya dalam meningkatkan kinerja UMKM, serta mengidentifikasi mekanisme melalui mana intervensi tersebut berdampak pada kinerja UMKM melalui kinerja keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif di Kota Jambi. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks spesifik Kota Jambi dan program Dumisake. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menginvestigasi pengaruh bantuan modal kerja (program Dumisake), pendampingan, dan pelatihan terhadap kinerja UMKM dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi dalam konteks geografis dan program yang spesifik ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bantuan modal kerja (program dumisake) terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
4. Bagaimana pengaruh bantuan modal kerja (program dumisake) terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi?

5. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Jambi?
6. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi?
7. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
8. Bagaimana pengaruh bantuan modal kerja (program dumisake) dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
9. Bagaimana pengaruh pendampingan dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?
10. Bagaimana pengaruh pelatihan dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara bantuan modal kerja (program dumisake) terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara pendampingan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara pelatihan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara bantuan modal kerja (program dumisake) terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.

5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung pendampingan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.
6. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara pelatihan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.
7. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh langsung antara kinerja keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi.
8. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh bantuan modal kerja (program dumisake) dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.
9. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pendampingan dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.
10. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelatihan dimediasi oleh kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang program dukungan yang lebih efektif untuk UMKM, khususnya di Kota Jambi. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta dalam merancang program pelatihan dan

pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal UMKM. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini membantu mengevaluasi efektivitas program bantuan modal kerja seperti Dumisake, sehingga dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pembiayaan yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan pentingnya penguatan kinerja keuangan UMKM sebagai prasyarat keberhasilan usaha. Selain itu, bagi pelaku UMKM sendiri, penelitian ini memberikan panduan untuk lebih optimal dalam memanfaatkan bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan yang tersedia guna meningkatkan kinerja usaha, memperkuat daya saing, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam kajian tentang kinerja UMKM, bantuan modal kerja, pendampingan, pelatihan, dan kinerja keuangan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana dukungan eksternal dapat memengaruhi kinerja UMKM melalui peran penting kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian serupa di daerah atau sektor yang berbeda, serta mendorong kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas intervensi pemerintah terhadap peningkatan kinerja usaha kecil dan menengah.

